

EVALUASI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
(Studi pada pengadaan Teknologi Produksi di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo)

Muchammad Hedi Aprilliyani

12040674021 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: muchammadhedi@gmail.com

Tauran, S.Sos., M.Soc., Sc.

0013047602 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: tauran_unesa@yahoo.com

Abstrak

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bidang perikanan. Guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang disebut pengembangan kawasan Minapolitan. Pusat kegiatan pengembangan kawasan Minapolitan adalah Kecamatan Candi dengan percontohan di Kelompok Budidaya Sumber Urip Desa Kedung Peluk. Kelompok Budidaya Sumber Urip Desa Kedung Peluk pada tahun 2011 masih menggunakan cara budidaya secara tradisional, sehingga belum bisa memaksimalkan potensi perikanan yang ada. Untuk memaksimalkan potensi perikanan, maka digunakanlah teknologi produksi dalam mengembangkan kawasan Minapolitan. Teknologi produksi yang digunakan berupa kincir air, diesel, dan semi intensif. Teknologi produksi mulai digunakan sejak tahun 2012. Kebijakan ini perlu untuk dievaluasi guna mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dari kebijakan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data adalah *purposive sampling* dimana subyek penelitian yang dipilih merupakan pihak yang mengetahui dan memahami mengenai kebijakan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, akan tetapi masih terdapat kendala dari segi efisiensi yang memberatkan biaya produksi dan beban kerja petani tambak, dari segi kecukupan masih kurangnya peralatan teknologi produksi yang tersedia. Di sisi lain banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya kebijakan ini.

Melihat masalah yang terjadi, saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya *sharing* antara pelaksana dengan kelompok sasaran, perlu adanya penambahan mesin-mesin terutama kincir air maupun jenset/diesel guna mencukupi kebutuhan kelompok pembudidaya ikan, perlu adanya sebuah inovasi energi selain menggunakan bahan bakar minyak guna menghemat biaya produksi, contohnya menggunakan tenaga gas maupun panel surya.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengembangan Kawasan Minapolitan, teknologi produksi

Abstract

Sidoarjo is one district that has the potential the field of fisheries. To encourage the acceleration of sector development maritime affairs and fisheries needs to be done economic development maritime affairs and fisheriesbased the called in regional development minapolitan. That became the center of development activities minapolitan area is Sub District Candi with introduction of pilot projects in group cultivation Sumber Urip kedung peluk village. Cultivation Group Sumber Urip Kedung Peluk village in 2011 are still using the traditional way of cultivation, so can not maximize the potential of existing fishing. To maximize the potential of fisheries, the production technology used in developing the Minapolitan region. The production technology used in the form of waterwheel, diesel and semi-intensive. The production technology used since 2012. These policies need to be evaluated to determine the extent to which the success rate in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment,

responsiveness and accuracy of the policy of production technologies in development in the Minapolitan region in Kedung Peluk village.

The method used is descriptive qualitative methods with data collection technique is purposive sampling where research subjects chosen are those who know and understand the policy of production technologies in development in the Minapolitan region in Kedung Peluk village. While the focus of this research is the effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy.

The results showed that the policy of production technologies in the development of the Minapolitan region in Kedung Peluk village has been run in accordance with the purpose for which it has been determined, but there are still constraints in terms of efficiency burdensome production costs and workload of fish farmers, in terms of adequacy is still a lack of equipment production technology which are available. On the other hand the many benefits that accrue to society by the existence of this policy.

See the occurred problems, the advice that can be given is the need for sharing between implementers with the target group, the need for the addition of machines especially waterwheel and jenset/diesel in order to fullfill the needs of a group of fish farmers, the need for an energy innovation in addition to using fuel oil to save on production costs, for example using gas power as well as solar panels.

Keywords : *Evaluation, The Development of Minapolitan Region, Production Technology*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dengan 2/3 bagiannya adalah lautan dan daratan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu 81.000 km², memiliki potensi ikan yang melimpah. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton ikan per tahun yang dikelola secara lestari dan 4,4 juta ton dapat ditangkap diperairan Indonesia dan 1,86 juta ton diperoleh dari perairan ZEEI (Suryati, 2008). Oleh sebab itu potensi yang dimiliki harus dimanfaatkan secara lebih maksimal guna memberikan peran yang optimal bagi pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan produksi di sektor perikanan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan tentang Minapolitan yang didasari oleh Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Untuk mewujudkan Minapolitan perlu adanya pengembangan Kawasan Minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya (Peraturan Menteri Kelautan Dan

Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan). Minapolitan dibagi menjadi tiga bidang perikanan yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan produk perikanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NO.KEP.39/MEN/2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP NO. 32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan, Kawasan Minapolitan dikembangkan di 33 provinsi atau 197 kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai kawasan Minapolitan adalah Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo memiliki lahan perikanan yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan Minapolitan. Sidoarjo yang terletak di pesisir utara pulau Jawa memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 30 kilometer yang terdapat disebelah timur tepatnya di wilayah kecamatan Sedati, Buduran, Sidoarjo, Candi dan Jabon. Secara keseluruhan luas pantai dan tambak yang ada di Sidoarjo sebesar 29,99% dari luas wilayah secara keseluruhan. Dengan kata lain Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan potensi perikanan tambak terbesar di Jawa timur apabila dapat diolah dan diberdayakan.

Berdasarkan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 tentang hasil perikanan budidaya da Sidoarjo terdiri dari Bandeng 23.295 kg, Udang Windu 3.782,5 kg, Udang Vanamei 1.676,6 kg, Udang Campur 4.002,2 kg, dan Tawes 1.000,8 kg. Sedangkan untuk komoditas yang

dibudidayakan di tambak antara lain udang windu, Udang Vanamei, Ikan Nila, Rumput laut dan Ikan Bandeng. Adapun yang menjadi produk unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut yaitu ikan bandeng. (Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 tentang pengembangan kawasan budidaya).

Sesuai dengan konsep pengembangan kawasan Minapolitan yang membagi kawasan Minapolitan yaitu daerah pusat Minapolitan, daerah sub pusat Minapolitan dan daerah penyangga Minapolitan. Maka daerah Minapolitan di Sidoarjo berpusat di kecamatan Candi, adapun untuk daerah sub pusat kawasan berada di kecamatan Sedati dan kecamatan Sidoarjo, sedangkan untuk kawasan penyangga Minapolitan berada di kecamatan Waru, kecamatan Buduran dan kecamatan Jabon (Keputusan Bupati Sidoarjo). Penunjukan beberapa kecamatan sebagai daerah pusat, daerah sub pusat maupun daerah penyangga Minapolitan di Sidoarjo melalui beberapa pertimbangan, diantara lain: 1) Sumber daya manusia (kelompok budidaya ikan), 2) Potensi perikanan.

Penunjukan kecamatan Candi menjadi pusat dari kawasan Minapolitan di Sidoarjo lebih didasari oleh peran serta kelembagaan melalui kelompok budidaya ikan (POKDAKAN) yang menjadi faktor penunjang pengembangan sektor perikanan di kecamatan Candi. Kelompok budidaya ikan yang ada di kecamatan Candi sendiri diawali dari inisiatif petani tambak yang ada di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi yang mendirikan kelompok budidaya ikan (POKDAKAN) “Sumber Urip”. Pokdakan Sumber Urip merupakan wakil dari Sidoarjo dan Jawa Timur dalam Lomba Kinerja Pokdakan dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Komoditi Udang Tingkat Nasional Tahun 2013, dan berhasil keluar menjadi juara 2 tingkat nasional pada tahun yang sama.

Kondisi petani tambak pada saat sebelum dilaksanakan pengembangan kawasan Minapolitan kebanyakan masih menggunakan cara tradisional untuk budidaya ikan yang dirasa kurang efektif dalam meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas produk perikanan. Pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan merupakan intervensi yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui kelompok kerja (POKJA) Minapolitan Kabupaten Sidoarjo di Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan serta aparaturnya Desa Kedung Peluk dalam rangka pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan. Dalam pengembangan kawasan Minapolitan ini terdapat beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan yang krusial dalam meningkatkan produktivitas perikanan yaitu pengadaan teknologi produksi.

Meskipun Kedung Peluk sebagai pusat dari kawasan Minapolitan bukan berarti tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan program kawasan Minapolitan. Kendala-kendala yang dimaksud seperti pengadaan teknologi produksi yaitu kincir air yang dayanya melebihi daya listrik yang ada di wilayah Kedung Peluk, kualitas obat-obatan yang kurang baik, selain itu juga mutu pembangkit listrik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Permasalahan pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk menarik untuk di evaluasi. Dengan evaluasi kebijakan akan didapatkan pertimbangan apakah kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan layak untuk dilanjutkan ataukah dihentikan. Secara teoritis untuk mengevaluasi suatu kebijakan, menurut Dunn (2003) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan. Kriteria tersebut meliputi (1) *effectiveness*, (2) *eficiency*, (3) *adequacy*, (4) *equality*, (5) *responsiveness*, (6) *appropriateness*. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengangkatnya dengan judul “Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan (Studi pada teknologi produksi di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan : “Bagaimana evaluasi program kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

mendesripsikan bagaimana evaluasi program kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Minapolitan
 - b) Dapat digunakan sebagai informasi dan acuan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian selanjutnya, khususnya tentang evaluasi program kawasan Minapolitan.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk perbaikan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, khususnya kelompok budidaya ikan Desa Kedung Peluk dalam hal kawasan Minapolitan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

James Anderson (Widodo, 2011:13) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah-masalah tertentu. Selanjutnya ada juga pendapat kebijakan publik menurut Friedrich (Widodo, 2011:13) mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk meningkatkan produksi perikanan di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan yaitu program

kawasan Minapolitan. Dalam program kawasan Minapolitan ini, pemerintah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menjalankan program tersebut agar berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Abdul Wahab (1997) merumuskan bahwa proses implementasi sebagai "*those actions by publik or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy*" "*those actions by publik or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu - individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Tindakan tindakan yang dilakukan merupakan transformasi semua keputusan yang dioperasionalkan dalam berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Budi Winarno dalam bukunya Kebijakan Publik Teori dan Proses (2007: 145) mengutip apa yang disampaikan oleh Ripley dan Franklin dalam *Bureucracy and policy implantation* yang berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible ouput*), sedangkan dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik tersebut Leo Agustino (2008:139), mengutip juga pernyataan Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

"Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwasannya implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilaksanakan atau langkah yang diambil guna mewujudkan sebuah kebijakan publik yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, proses implementasi merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dalam rangka mewujudkan rencana kebijakan yang ingin dicapai.

C. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino (2006:186) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk melihat dan menilai apakah suatu kebijakan telah mampu memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut.

Model evaluasi CIPP (*Contexts, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Model evaluasi CIPP adalah kerangka komprehensif dalam memandu kegiatan evaluasi formatif dan sumatif, program, perseorangan, produk, instansi dan sistem. Model ini diatur untuk digunakan dalam

evaluasi internal maupun eksternal. Dalam evaluasi internal yang diselenggarakan oleh evaluator dari dalam organisasi maupun evaluator pribadi yang diselenggarakan oleh regu perancang atau penyedia jasa individu, serta evaluasi eksternal yang diberikan kepada kontraktor dari luar organisasi untuk melakukan evaluasi. Model ini telah digunakan diseluruh Amerika Serikat dan dunia, diterapkan dalam evaluasi diberbagai bidang, seperti kependidikan, perubahan sosial masyarakat, keselamatan transportasi dan dalam bidang militer.

Proses evaluasi akan memperhatikan keberkaitan secara menyeluruh, mulai dari konteksnya yang meliputi informasi dari beberapa faktor mengenai kondisi dan karakteristik konteks sebelum suatu program dilaksanakan, masukan (*input*) yang diberikan sebagai persiapan pelaksanaan program supaya bisa berjalan lancar, proses bagaimana program dilakukan dari awalnya dengan pendekatannya apakah sesuai dengan konteksnya dan merupakan proses yang tepat untuk mencapai tujuan program, dan akhirnya bagaimana kualitas hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan program yang dievaluasi tersebut. (H. B. Sutopo, 2002:116).

Dunn (2003:610) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang terdiri atas :

- a. Efektifitas (*effectiveness*). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
- c. Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

- d. Perataan (*equity*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
- e. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
- f. Ketepatan (*appropriateness*). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memilih menggunakan pisau analisa kriteria

evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn. Permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk yaitu : 1. Kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan belum terealisasi dengan baik, 2. Daya listrik peralatan teknologi produksi yang terlalu besar, 3. Kualitas diesel / jenset yang kurang memadai, 4. Jumlah peralatan teknologi produksi yang masih terbatas. Berdasar permasalahan ini bisa dilihat termasuk dalam kriteria evaluasi menurut Dunn.

Berbeda halnya dengan model CIPP. Model ini lebih mengfokuskan pada perangkat pengambil keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasional program pada tiap tipe evaluasi. Sehingga kurang sesuai apabila peneliti menggunakan model CIPP dikarenakan penelitian ini ingin mengevaluasi pelaksanaan program kawasan Minapolitan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendapat data lengkap serta lebih valid mengenai evaluasi pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. dalam mendeskripsikan evaluasi kebijakan ini peneliti menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Willim N Dunn yakni Efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana pengambilan *sample* sumber data dengan mempertimbangkan bahwa orang yang dijadikan informan merupakan orang yang mengetahui dan mengalami atau bagian dari kelompok sasaran. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan bantuan alat berupa kamera, *tape recorder* dan lembar catatan atau pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Secara administratif desa Kedung Peluk merupakan desa yang berada di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, terletak 6 Km sebelah timur pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran rendah yaitu berada di ketinggian 1,20 meter diatas permukaan laut. Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi memiliki luas wilayah sebesar 1.128.665 Ha. Wilayah tersebut terdiri dari permukiman, sawah, tambak, pekuburan, jalan, dll.

Luas wilayah di desa Kedung Peluk didominasi oleh tambak dengan luas sebesar 1.031.665 Ha dan disusul oleh sawah dan ladang sebesar 61.846 Ha. Sedangkan luas pemukiman hanya sebesar 31.160 Ha. Jumlah penduduk di desa ini berjumlah 3.537 orang yang terdiri dari 1.742 orang laki-laki dan 1.795 orang perempuan. Selain itu juga terdapat sebanyak 893 Kepala Keluarga (KK).

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berumur 3-58 tahun berjumlah 715 orang. Jadi jumlah tersebut rata-rata masih aktif bekerja. Sedangkan jumlah penduduk yang berusia diatas 58 sebesar 169 orang tersebut kebanyakan pensiunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk di desa Kedung Peluk masih banyak yang berusia produktif.

Kemudian untuk mata pencaharian, diketahui bahwa jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai karyawan swasta lebih banyak daripada mata pencaharian lainnya yaitu sebanyak 1.415 orang. Sedangkan petani berjumlah 155 orang, wiraswasta 48 orang, sektor jasa 30 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 23 orang. Tingkat tamatan pendidikan di desa ini terdiri dari tamatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 951 orang, SMP/SLTP sebanyak 711 orang, SMA/ALTA sebanyak 545 orang, Akademi/D1-D3 sebanyak 34 orang dan Sarjana (S1-S3) sebanyak 37 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk yang ada di desa Kedung Peluk

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo rata-rata tingkat pendidikannya masih rendah.

B. Deskripsi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Minapolitan adalah konsep yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan perikanan di Indonesia. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

C. Kelembagaan dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan

Untuk mengkordinasikan dan mengefektifkan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan khususnya disektor budidaya maka perlu dibentuklah lembaga pelaksana meliputi tim pembina, tim teknis dan UPT sebagai pendamping teknis serta kelompok pelaksana. Pembina pusat merupakan Ditjen Perikanan Budidaya yang bertanggungjawab dalam merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan percontohan, menyusun petunjuk pelaksanaan percontohan serta melakukan wvaluasi pelaksanaan percontohan.

Pembina Tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas KP Provinsi dan BAKORLUH Provinsi yang bertugas untuk melakukan pembinaan keberhasilan percontohan ditingkat provinsi, melakukan pembinaan teknis penyuluhan dan penyebarluasan infomasi teknologi, memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan percontohan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percontohan perikanan budidaya di kawasan Minapolitan baik Dinas KP Provinsi maupun BAKORLUH.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi Perikanan Budidaya

bertanggung jawab terhadap keberhasilan percontohan perikanan budidaya di kawasan Minapolitan, yang berkoordinasi dengan BAPELUH dan mempunyai tugas untuk menunjuk penanggung jawab pelaksanaan percontohan tingkat Kabupaten/Kota, menetapkan lokasi dan Pokdakan percontohan berdasarkan usulan hasil identifikasi Tim Teknis dibuktikan dengan Berita Acara penetapan, membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jendral Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT Pendamping, melaksanakan temu lapang untuk mengevaluasi pelaksanaan percontohan, membuat searah terima hasil percontohan kepada Pokdakan yang dibuktikan dengan berita acara, memfasilitasi kemitraan dengan *stakeholders* lainnya untuk keberlanjutan usaha, melaporkan kepada Direktur Jendral Perikanan Budidaya Cq. Direktur produksi baik pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir secara tertulis.

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan percontohan di kawasan Minapolitan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas untuk menunjuk pendamping teknis di masing-masing lokasi percontohan, melakukan identifikasi lokasi dan Pokdakan bersama tim teknis, menyusun SOP budidaya dengan menerapkan teknologi anjuran (SNI, CPIB, dan CBIB), melakukan pendampingan teknis dan manajemen pelaksanaan percontohan di kawasan Minapolitan, serta melakukan monitoring dan evaluasi percontohan.

Tim Teknis pelaksana percontohan perikanan budidaya di kawasan Minapolitan terdiri dari Dinas KP Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan budidaya, UPDTD dan Penyuluh yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang meliputi melakukan koordinasi dengan UPT Ditjen Perikanan Budidaya sebagai pendamping untuk penetapan calon lokasi dan calon Pokdakan pelaksana, melakukan identifikasi calon lokasi percontohan dan

Pokdakan pelaksana, merekomendasikan lokasi percontohan dan Pokdakan pelaksanaan berdasarkan hasil identifikasi, mensosialisasikan percontohan di kawasan Minapolitan, menyusun SOP budidaya dengan menerapkan teknologi anjuran (SNI, CPIB, dan CBIB) bersama dengan UPT Ditjen PB, menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan bersama Pokdakan, menunjuk Manajer Teknis yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam operasional kegiatan percontohan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Ditjen Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi.

Kelompok pembudidaya adalah pelaksana percontohan perikanan budidaya di kawasan Minapolitan yang diusulkan oleh Tim Teknis dan ditetapkan oleh Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota dan bersedia untuk menandatangani surat pernyataan berupa penyiapan lahan percontohan budidaya secara berkelanjutan, sanggup mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan kawasan Minapolitan, sanggup melaksanakan manajemen kelompok secara kolektif (tanggung renteng), menerapkan dan disertifikasi CPIB/CBIB, serta menerapkan manajemen kawasan untuk mempermudah pengendalian penyakit.

Mitra adalah *stakeholder* terkait yang akan mendukung keberlanjutan usaha budidaya terutama dalam hal membantu penjaminan promosi dan pemasaran produk. Selanjutnya, kelompok dapat membentuk koperasi dan atau bermitra dengan *stakeholders* lainnya untuk penyediaan sarana produksi dan permodalan.

D. Mekanisme Pengembangan Kawasan Minapolitan

Dalam mekanisme pengembangan kawasan Minapolitan sektor budidaya terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Penyusunan dan penetapan konsep kawasan Minapolitan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas KP Kab/Kota yang berkoordinasi dengan UPT sebagai pendamping teknis.
3. Identifikasi lokasi dan pokdakan diharapkan dapat menjamin keselarasan dengan pembangunan wilayah di daerah dan keadaan sosial di lingkungan sekitarnya.
4. Penetapan lokasi dan pokdakan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Tim Teknis, melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan dibagi dalam beberapa tahapan yaitu persiapan, pembinaan teknis, temu lapang, pola pengadaan percontohan, berbasis pada manajemen kelompok secara kolektif
6. Melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif
7. Penguatan kelembagaan pokdakan

E. Pembahasan

Evaluasi kebijakan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk melihat dan menilai apakah suatu kebijakan telah mampu memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan telah berjalan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu meningkatkan produktivitas perikanan dan meningkatkan pendapatan nelayan, petani tambak, pengolah hasil perikanan secara adil dan merata. Banyak manfaat yang diperoleh petani tambak dengan adanya teknologi produksi, namun masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang terjadi yaitu masih minimnya jumlah alat yang ada, kapasitas listrik yang belum memadai untuk penggerak kincir air dan kualitas diesel yang belum mumpuni. Maka dari itu perlu adanya evaluasi, untuk mengevaluasi pengembangan kawasan Minapolitan ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam suatu kebijakan publik diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program sehingga dapat diketahui hasil yang telah dicapai seiring dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk secara keseluruhan telah efektif dilaksanakan artinya telah berjalan sesuai dengan dengan tujuan dari Minapolitan meskipun dalam peningkatannya tidak begitu signifikan.

Tujuan dari pengembangan kawasan Minapolitan adalah meningkatkan hasil perikanan dan meningkatkan pendapatan petani tambak nelayan serta pengolah hasil perikanan secara merata. Tujuan tersebut telah terwujud dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk akan tetapi belum terjadi peningkatan yang signifikan terutama dalam meningkatkan pendapatan petani tambak.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengurus serta anggota Pokdakan Sumber Urip Desa Kedung Peluk dapat diketahui bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan ini. Peningkatan hasil perikanan mengalami peningkatan karena dengan adanya teknologi produksi ini mampu meningkatkan kapasitas penebaran sehingga dengan lahan seminimal mungkin bisa melakukan penebaran secara maksimal.

Menurut masyarakat sebelum ada bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan, petani tambak menggunakan cara tradisional dengan tambak yang sangat luas akan tetapi hasilnya tidak sebanding dengan luas tambak tersebut.

Hal itu dibenarkan oleh Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Penyuluh Perikanan Kecamatan Candi yang mengatakan bahwa dengan adanya teknologi produksi ini bisa meningkatkan hasil perikanan dengan catatan bahwa harus terus dilakukan pemantauan untuk melihat perkembangan

dari ikan/udang yang dibudidayakan selain itu juga dibarengi dengan penggunaan pakan serta probiotik yang berkualitas.

Selain diharapkan mampu meningkatkan hasil perikanan bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani tambak, nelayan dan pengolah hasil perikanan secara merata. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah anggota Pokdakan Sumber Urip Desa Kedung Peluk dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan teknologi produksi ini mampu meningkatkan pendapatan dari petani tambak akan tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan disebabkan oleh biaya produksi yang bertambah serta dipengaruhi oleh harga dipasaran.

Hal itu juga dibenarkan oleh Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Penyuluh Perikanan Kecamatan Candi yang mengatakan bahwa dengan adanya teknologi produksi ini bisa meningkatkan pendapatan kelompok sasaran seiring dengan meningkatnya hasil perikanan.

2. Efisiensi

Efisiensi program dapat diketahui dari jumlah sumber daya yang dikeluarkan lebih sedikit dengan sasaran program yang dicapai menghasilkan hasil yang memuaskan. bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk belum bisa dikatakan efisiensi artinya biaya produksi serta penggunaan sumber daya manusia semakin tinggi seiring dengan penggunaan teknologi produksi dalam cara pembudidayaan ikan. Bantuan teknologi produksi ini hanya mempersingkat waktu produksi.

Dari wawancara yang dilakukan dengan anggota Pokdakan Sumber Urip dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan teknologi budidaya ini memberatkan pada ongkos/biaya produksi. Peningkatan biaya produksi ini disebabkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

untuk tenaga penggerak yang bisa menghabiskan antara 15-30 Liter per hari.

Para anggota Pokdakan Sumber Urip mengatakan bahwa semakin membebani pekerjaan petani tambak. Menurut mereka dengan metode tradisional hanya membutuhkan satu orang sebagai pejaga tambak, dengan adanya bantuan teknologi produksi harus menambah untuk teknisi khusus yang bertugas menangani teknologi produksi (kincir air, diesel dan pompa air).

Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Penyuluh Perikanan Kecamatan Candi yang mengatakan bahwa penggunaan teknologi produksi ini akan berdampak pada peningkatan biaya produksi dikarenakan dengan semakin padatnya penebaran bibit ikan akan semakin memerlukan pakan dan probiotik yang juga meningkat disamping juga ada tambahan dari bahan bakar minyak yang digunakan untuk mesin. Selain itu juga mengakibatkan bertambahnya beban kerja dari petani tambak, setidaknya dalam cara budidaya semi intensif (teknologi produksi) dibutuhkan tenaga 2-3 orang sebagai pekerja tetap untuk satu periode penebaran.

Menurut penuturan Pokdakan Sumber Urip penggunaan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan bisa mempercepat masa penebaran sampai dengan masa panen. Tetapi ini bukan faktor utama dalam mempercepat masa panen. Pernyataan ini dibenarkan oleh pelaksana pengembangan kawasan Minapolitan dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan penyuluh perikanan Kecamatan Candi yang menyatakan bahwa memang benar teknologi produksi ini mampu mempercepat masa panen akan tetapi bukan faktor yang utama karena dalam perikanan kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Adapun faktor lain yang juga mendukung percepatan masa panen yaitu kualitas air, kualitas bibit, pakan dan probiotik yang digunakan dalam budidaya perikanan.

3. Kecukupan

Kecukupan dapat diartikan dengan apabila suatu kebijakan publik atau program telah mencukupi kebutuhan dari kelompok sasaran. Setelah mencukupi akan sendirinya muncul rasa kepuasan atas apa yang didapat dari kebijakan yang dilaksanakan. Untuk bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan ini secara keseluruhan belum dapat mencukupi kebutuhan petani tambak akan adanya teknologi produksi untuk memaksimalkan potensi perikanan.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus serta anggota kelompok Sumber Urip mereka mengatakan bahwa bantuan tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan petani tambak yang tergabung dalam kelompok, hal ini disebabkan karena jumlah mesin yang tidak sepadan dengan jumlah anggota. Pernyataan dari pengurus dan anggota kelompok Sumber Urip juga dibenarkan oleh pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa kebutuhan petani tambak belum bisa dikatakan tercukupi dengan bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan. Pihak pelaksana juga mengatakan bahwa kurang tercukupinya kebutuhan petani tambak disebabkan kurangnya anggaran sehingga mengakibatkan rasa puas yang belum terwujud dari anggota kelompok Sumber Urip.

4. Perataan

Perataan dapat diartikan keadilan dan kewajaran. Perataan dalam pengembangan kawasan Minapolitan ini adalah pemerataan pemberian bantuan teknologi produksi kepada pembudidaya yang tergabung dalam kelompok budidaya ikan Sumber Urip. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk perataan sudah terwujud, petani tambak akan bergiliran dalam penggunaan teknologi produksi.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengurus dan anggota Pokdakan Sumber Urip dapat diketahui bahwa bantuan ini bersifat kolektif, dalam arti bahwa bantuan ini tidak diberikan kepada satu

orang melainkan untuk satu kelompok. Dalam pemerataan penggunaannya ada ketentuan yang dibuat dan disepakati bersama untuk menggunakan bantuan ini secara merata dan seadil-adilnya.

Hal ini dibenarkan oleh pihak pelaksana dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa bantuan teknologi produksi di Kedung Peluk ini digunakan untuk kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu juga agar lebih memudahkan pihak pelaksana dalam memonitoring hasil yang telah dicapai.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Pengembangan kawasan Minapolitan ini menjawab respon mengenai potensi perikanan di Desa Kedung Peluk. tanggapan masyarakat cukup puas dengan adanya bantuan ini karena dapat mengembangkan potensi perikanan yang dimiliki.

Dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pengurus dan anggota Pokdakan Sumber Urip dapat diketahui bahwa mereka merasa cukup puas dengan adanya bantuan ini mereka bisa memaksimalkan potensi perikanan yang dimiliki. Akan tetapi bukan berarti tidak ada kekurangan, menurut mereka unit mesin yang disediakan masih sangat kurang dalam mencukupi kegiatan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan pelaksana mereka membenarkan bahwa adanya bantuan ini telah menjawab keinginan masyarakat untuk memaksimalkan potensi perikanan. Pelaksanan juga mengatakan bahwa kelompok sasaran cukup puas hal ini bisa dilihat dari keaktifan anggota kelompok Sumber Urip dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan.

6. Ketepatan

Ketepatan dapat diisi dengan indikator keberhasilan kebijakan lainnya, dan dapat merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam

pelaksanaannya pengembangan kawasan Minapolitan secara keseluruhan telah tepat dilaksanakan di Desa Kedung Peluk artinya telah tepat sasaran dilaksanakan di wilayah yang memiliki potensi perikanan untuk dikembangkan lebih lanjut. Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengurus dan anggota Pokdakan Sumber Urip dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan ini telah memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi petani tambak. Dari hasil wawancara dengan sejumlah pengurus dan anggota Pokdakan Sumber Urip dengan adanya teknologi produksi ini pengetahuan petani tambak bertambah dalam arti terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena sebelum diberi bantuan terlebih dahulu petani tambak mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi produksi.

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan yang menyatakan bahwa banyak manfaat yang diperoleh petani tambak dengan adanya bantuan ini. Manfaat yang diperoleh berupa peningkatan hasil perikanan, peningkatan pendapatan petani tambak selain itu juga meningkatkan pengetahuan akan cara budidaya ikan yang baik bagi petani tambak. Dengan demikian secara keseluruhan bantuan teknologi produksi telah tepat dilaksanakan di wilayah Desa Kedung Peluk.

KESIMPULAN

Pengembangan kawasan Minapolitan belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan dalam membantu petani tambak dalam memaksimalkan potensi perikanan. Dari segi efektivitas, secara keseluruhan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk telah berjalan efektif karena telah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Minapolitan yaitu telah mampu meningkatkan hasil perikanan dan meningkatkan pendapatan petani tambak.

Dari segi efisiensi, teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk belum bisa dikatakan efisien karena biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tanam ikan semakin besar. Dari segi Sumber Daya Manusia dengan adanya tambahan beban kerja bagi petani tambak maka perlu adanya tambahan tenaga kerja. teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan ini hanya mengurangi dari segi waktu produksi saja.

Dari segi kecukupan, teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk belum bisa mencukupi kebutuhan petani tambak secara keseluruhan dikarenakan masih terbatasnya jumlah alat yang ada, sehingga menimbulkan rasa puas yang kurang dari kelompok sasaran.

Dari segi pemerataan, teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk belum bisa dikatakan merata secara keseluruhan karena masih ada yang belum mendapat giliran penggunaan teknologi produksi, hal ini tidak lepas dari masih kurangnya peralatan yang dibutuhkan petani tambak. Segi responsivitas bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk telah cukup memuaskan kebutuhan petani tambak hal ini dapat dilihat dari keaktifan Pokdakan Sumber Urip.

Dari segi ketepatan, teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk secara keseluruhan telah tepat dilaksanakan di Desa Kedung Peluk artinya telah tepat sasaran dilaksanakan di daerah yang memiliki potensi perikanan dan masih belum mampu mengembangkan potensi perikanan tersebut. Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan teknologi dalam pengembangan kawasan Minapolitan ini.

SARAN

Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk ini sudah berhasil dilaksanakan dalam membantu masyarakat untuk menggali potensi perikanan yang dimiliki, namun terdapat beberapa kendala yang terjadi.

Untuk itu perlu adanya evaluasi untuk mengetahui kendala tersebut sehingga dapat diberikan solusi. Berikut ini saran yang bisa menjadi solusi dalam pelaksanaan bantuan teknologi produksi dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Kedung Peluk.

1. Perlu adanya *sharing* antara pelaksana dengan kelompok sasaran sehingga bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat.
2. Perlunya adanya penambahan mesin-mesin terutama kincir air maupun jenset/diesel guna mencukupi kebutuhan kelompok pembudidaya ikan.
3. Perlunya adanya sebuah inovasi energi selain menggunakan bahan bakar minyak guna menghemat biaya produksi, contohnya menggunakan tenaga gas maupun panel surya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku, Jurnal dan Skripsi

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabetha.
- Atmaji, Ayuning Siwi. 2012. *Kajian Elemen Spasial Pada Gagasan Minapolitan Perikanan Tangkap Di Pelabuhanratu*. Departemen Arsitektur Universitas Indonesia. Skripsi diterbitkan. Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Ansoriyah, Lailiyul, dkk. 2013. *Implementasi Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Dan Petani Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)*. Jurusan administrasi publik Universitas Brawijaya. Malang : FIA Universitas Brawijaya.
- Kamuli, Sukarman. 2014. *Evaluasi Tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurusan administrasi negara Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo : FIS Universitas Negeri Gorontalo.
- Mustofa, Beny Ivan. 2011. *Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan "Kampung Lele" Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) Didesa*

Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Skripsi diterbitkan. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Negeri Sebelas Maret.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media

- Rosdiana, Haula. 2013. *Does State Levies Policy Support Minapolitan Program in Indonesia*. Departemen administrasi publik Universitas Indonesia. Depok : FISIP Universitas Indonesia.
- Subarsono, A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabetha.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabetha.
- Suryati. 2008. *Kebiasaan Makan Ikan Serta Hubungannya Tentang Dengan Status Gizi Anak Usia 6-59 Bulan Pada Keluarga Nelayan Harian Di Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2008*. Skripsi diterbitkan. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Konsep dan Aplikasi : Analisis Proses*. Malang: Banya Media Publishing.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Daftar Rujukan Online**
- Sharif, C. 2014. *konsumsi ikan masyarakat Indonesia terus meningkat*, <http://www.ekbis.sindonews.com/read/824665/34/konsumsi-ikan-masyarakat-Indonesia-terus-meningkat-1389165999>, diakses pada 16 september 2015